



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com

Tarempa, 09 Mei 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :B/000.7.2.4/95.9/DISHUBLH.SPNG/05/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas <i>(Soft Copy dan Hard Copy)</i>	1 Dokumen	Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :

Yang menerima

Nama :

NIP/NIPTT :

Tanda tangan :

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,



Abdul Kadir, S.T.M.,Si

Pembina Tingkat IV/b)

NIP. 19790125 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

Rancangan Perubahan | 2025

RENJA |

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja Perangkat Daerah (PD) dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada penetapan RKPD. Renja akan berfungsi sebagai pedoman PD dalam menyusun RKA PD. Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Diharapkan nantinya Renja ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Tarempa, 09 Mei 2025

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,
Kabupaten Kepulauan Anambas,



Abdul Kadir, ST., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19790125 201001 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	5
II.2 Evaluasi Capaian Renja DISHUBLH Tahun 2023 ...	5
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD	13
II.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	14
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH	16
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	16
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	17
III.3 Analisis Kinerja PD	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	23
Tabel Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	28
BAB V PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja-PD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral Perangkat Daerah atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan perubahan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan perkiraan pencapaian kinerja Program/Kegiatan baik pada Renja PD dan Renstra-PD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Rancangan Perubahan Renja-PD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- Rancangan Tema Pembangunan :
“Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”
- Rancangan Prioritas Pembangunan :
 1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
 2. Pemantapan kualitas sumber daya yang sehat, unggul dan berdaya saing;

3. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Rancangan perubahan Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan, Serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1. 2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan perubahan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulaun Anambas Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang

- Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).

1. 3 Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun program dan kegiatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

❖ Tujuan

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025;
3. Untuk memastikan dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1. 4 Sistematika Penulisan

Adapun dokumen Rancangan perubahan renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dalam bagian ini dituangkan dalam bentuk tabel yang berisi rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah (tahun n).
- BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
 3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

II. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024).

II. 2 Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam perjalannya, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tidak berlangsung sesuai dengan rencana awal dikarenakan adanya perkembangan isu strategis daerah, global dan nasional, sehingga mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Melalui Rancangan perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan Penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 12 Program, 23 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.755.177.153,00. Dari pagu sebesar Rp. 40.755.177.153,00 telah terealisasi sebesar Rp. 30.582.353.585,39 (75,04%) dan realisasi fisik 65,74%.

Program / kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan capaian renstra sebagaimana tertuang dalam tabel data berikut :(*halaman selanjutnya*)

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Anambas**

Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Drearah) Tahun 2021-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
				K	Rp	Tar get	Realisasi (Rp)	(%)		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
01.00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						30.582.353.585				
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						12.024.095.782				
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	30.150.000		12.514.800				
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			5	12.514.800	60,77			
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			1	-	-			
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	6.485.060.700		5.136.917.277				
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan			42	4.762.732.277	90,29			
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			1	374.185.000	95,61			
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	757.415.800		647.782.981				
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1.506.900	9,14			
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	129.149.000	67,86			

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			1	91.425.820	81,67			
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	35.728.850	75,70			
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1	66.405.700	99,22			
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			1	323.566.711	70,08			
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	40.840.000		26.598.000				
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	26.598.000	68,20			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	6.989.394.950		6.013.570.724				
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			6	48.759.404	89,12			
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			3	45.335.000	64,97			
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			2	14.228.000	88,30			
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	5.905.248.320	88,48			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	834.568.000		186.712.000				
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			35	113.512.000	51,94			
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	73.200.000	99,08			
01.1	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						351.690.581				
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						240.178.126				

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1.674.000	99,54			
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	92,39	-			
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	1.046.400	96,59			
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	178.423.580	99,83			
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			1	3.840.000	100,00			
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	19.829.000	99,15			
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1	35.365.054	99,83			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.750.925				
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket			6	5.441.925	95,97			
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			3	14.309.000	85,37			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.761.530				
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			1	88.191.530	99,97			
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	3.570.000	100,00			
01.2	UPT PENGELOLAAN SAMPAH										
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						772.541.239				
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						341.950.493				
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	836.800	98,91			

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	243.019.000	97,69			
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1.512.500	52,52			
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			1	-	-			
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			1	37.561.393	98,15			
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	10.935.000	75,15			
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1	48.085.800	98,05			
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.612.436				
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			6	2.689.700	98,89			
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			3	922.736	29,88			
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						426.978.310				
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			10	426.978.310	98,25			
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	-	-			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						11.078.746.775				
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			80%	2.221.483.242		698.442.961				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit			10	686.072.161	21,27			
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit			4	12.370.800	4,85			
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						7.506.400				

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan			1	7.506.400	5,00			
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	590.589.000		10.372.797.414				
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit			6	10.372.797.414	95,15			
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan			1	-	-			
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						4.718.226.002				
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal		117 Kali	28.483.537.603			4.718.226.002				
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dibangun	Unit			2	3.734.769.539	50,76			
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			2	805.976.863	77,81			
2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpulan lokal	Jumlah pelabuhan yang dipelihara	paket			2	177.479.600	84,51			
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						546.286.911				
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						179.858.000				
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			3	179.858.000	100,00			
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						366.428.911				
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			1	366.428.911	78,06			

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						14.651.472				
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3 Kali	231.283.000		14.651.472				
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, dara, dan Laut	Dokumen			3	14.651.472	29,30			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen			2	-	-			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						28.275.100				
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			3 Kali	293.757.000		28.275.100				
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha			3	28.275.100	27,54			
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						30.087.220				
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7 Kegiatan	566.921.000		30.087.220				
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah	Laporan			3	30.087.220	60,17			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						67.847.200				
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2 Sekolah	227.096.000		67.847.200				
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen			2	67.847.200	51,97			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						949.905.303				
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			6 Kali	725.000.000		949.905.303				

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan			3	136.832.500	88,28			
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton			729,98	805.572.803	96,88			
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok			5	7.500.000	4,92			

II. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah :
 1. Isu keselamatan transportasi terkait kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas serta ketersediaan sarana prasarana transportasi;
 2. Inovasi-inovasi dibidang lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
 3. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan perencanaan dibidang lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
- Sumber Daya Manusia Aparatur
 1. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi;
 2. Mengikuti Pendidikan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
 4. Peningkatan pelayanan dibidang Perhubungan dan lingkungan hidup terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- Sarana dan Prasarana
 1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
 2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
 3. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.
- Isu Isu Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan pembangunan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Ketidakseimbangan serta pemunggiran terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, semua program pembangunan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, kegiatan yang sejalan dengan PUG antara lain pembangunan Pelabuhan. Desain pelabuhan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam bentuk desain yang humanis sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat baik laki-laki, wanita, anak-anak dan pengguna berkebutuhan khusus (Disabilitas).

➤ Strategi Kabupaten Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Kegiatan yang menunjang Program Kabupaten Kota Sehat adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan bersih permukiman
- b. Pengelolaan Sampah
- c. Tempat Pemrosesan akhir sampah di TPAS
- d. Pengembangan kinerja pengolahan sampah

II. 4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari PD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Tabel. Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Kecamatan	Usulan Musrenbang	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Siantan	Pembangunan pelabuhan nelayan	Desa Sri Tanjung, Kab. Kepulauan Anambas	
2	Siantan Selatan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan lampu penerangan jalan umum dan sarana umum kecamatan• Pembangunan pelabuhan nelayan• Pembangunan pelabuhan nelayan	<ul style="list-style-type: none">• Air Bini• Tiangau• Mengkait	
3	Siantan	Pembangunan TPA (Tempat	RT. 004/ RW 002 Air	

	Tengah	Pembuangan Akhir) (60m x 100m)	nangak, Kab. Kepulauan Anambas	
4	Siantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan DED dan pembangunan pelabuhan perintis kecamatan Siantan Timur • Pembangunan pelabuhan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Nyamuk • RT 01/ RW 01 desa Nyamuk 	
5	Palmatak	Peningkatan dermaga/ pelabuhan desa Matak (P= 60M, L=6M)	Desa Matak	
6	Jemaja	Penerangan jalan umum di kecamatan Jemaja	Rewak-Kusik-Sedanau, Padang Melang-Terdun-Sedanau, Padang Melang Bandara, Genting Dusun Teluk Kaut- Atap- Air Biru, Atap Semuak	
7	Jemaja Barat	Penyambungan pelabuhan beton bertulang (50M X 4M)	Desa Impol	
8	Jemaja Timur	Pengadaan Lampu Jalan 4KM	Desa Bukit Padi	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

Isu Strategis yang diangkat dalam Renstra Kementerian Perhubungan yaitu membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi umum massal perkotaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 memiliki empat pilar agenda kerja yaitu:

1. Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan)
2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan (ekonomi)
3. Fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial)
4. Tata Kelola dan Inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata Kelola).

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD 2025 sebagai berikut : **“Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”.**

Sedangkan yang menjadi Rancangan Prioritas Pembangunan adalah :

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

III. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhhlakul Karimah". Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh intansi. Untuk mewujudkan visi maka dibuat misi, adapun misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan 4 (empat) yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran.

Misi pembangunan yang selaras dengan urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata
2. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
3. Pemberantasan Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025, yaitu :

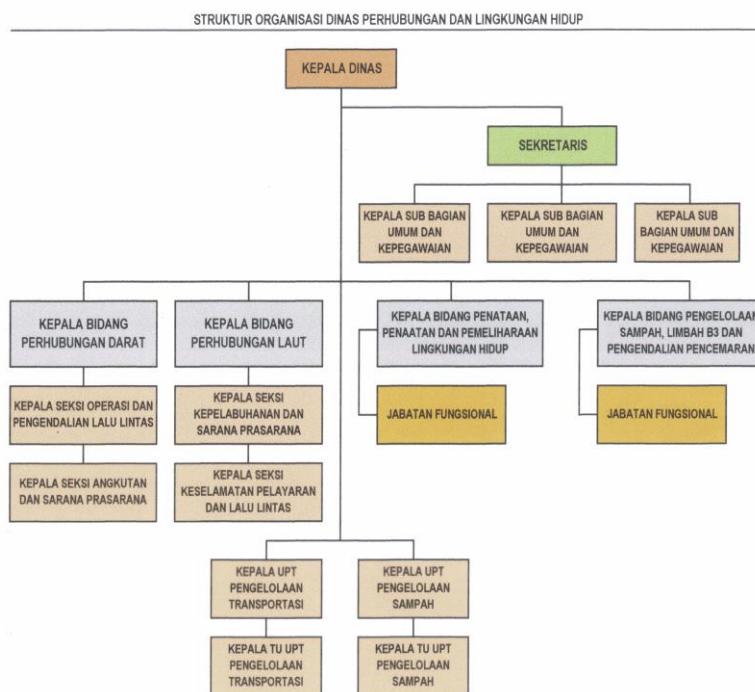
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi;
 - a. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan jalan;
 - b. Meningkatnya sistem pelayanan angkutan umum.
2. Mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Terciptanya lingkungan daerah perkotaan dan pesisir yang bersih.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 sesuai dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan	73,02	73,29	73,55	73,81	74,08	74,84
			Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	56,60	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10
			Indeks Kualitas Udara	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
			Indeks Kualitas Lahan	78,43	79,27	80,11	80,96	81,81	82,66
2	Meningkatkan akuntabelitas kinerja		Nilai Reformasi Birokrasi	30,00	40,00	50,00	60,10	60,20	60,20
			Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	Nilai AKIP	55,00	57,00	60,00	60,10	60,20
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,45	0,61	0,74	0,84	1,00	1,00
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,00
			Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Percentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	43,20	59,50	73,00	83,80	100
			Percentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapras alat perlengkapan jalan	51,61	59,45	66,82	74,65	82,49	89,86

III. 3 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi Kepala Seksi/Kasubbag. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



❖ Daftar Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Perhubungan Darat
3. Bidang Perhubungan Laut
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
5. Bidang Penataan, Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan teknis urusan perhubungan dan lingkungan hidup, DISHUBLH memiliki 2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu :

1. UPT Pengelolaan Transportasi
2. UPT Pengelolaan Sampah

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, DISHUBLH mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISHUBLH;
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISHUBLH;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

❖ Data Aparatur Dinas Perhubungan dan Linkungan Hidup

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 244 orang. Dari ke 244 pegawai tersebut, 31 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang berstatus PPPK, sedangkan yang lainnya berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 211 orang.

Tabel. Data Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan							Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	NON	
1	PNS	2	19	5	5	-	-	-	31
2	PPPK	-	3	-	-	-	-	-	3
3	PTT	-	15	11	126	19	26	14	211
Jumlah		2	37	16	131	19	26	14	244

Tabel. Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	2
2	Penata Tk.I (III/d)	8
3	Penata (III/c)	5
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	3
5	Penata Muda (III/a)	10
6	Pengatur Tk.I (II/d)	4
Jumlah		31

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kapasitas SDM di bidang perhubungan guna mengembangkan layanan dan implementasi program, pengawasan dan pengendalian di lapangan;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan kajian dan penelitian yang komprehensif terhadap prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan;
3. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas;
4. Belum optimal penanganan akhir sampah karena lahan TPA belum tersedia;
5. Petugas sampah banyak yang sudah berusia lanjut;
6. Belum adanya tempat pembibitan pohon karena tidak ada lahan milik Pemda;
7. Belum terintegrasinya pembinaan pendidikan lingkungan hidup;
8. Belum tersedianya Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Pelabuhan yang sudah terbangun minim dengan sarana prasarana penunjang seperti ruang tunggu, lampu penerangan, dll.
2. Minimnya rambu-rambu yang ada di wilayah perairan yang digunakan sebagai jalur pelayaran.
3. Selain konektivitas, terdapat masalah lain di bidang perparkiran. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, banyak kendaraan yang menggunakan jalan sebagai lokasi parkir inap. Selain itu, penerimaan daerah dari sektor perparkiran juga belum optimal.
4. Penanganan sampah yang belum optimal, karena terbatasnya sarana prasarana.
5. Tingginya produksi sampah rumah tangga yang belum diimbangi kemampuan pengelolaan sampah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2025 beserta indikatornya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan tersebut. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Agar tujuan Dinas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tercapai diperlukan adanya tindakan nyata berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RENSTRA /RPJMD.

Pada tahun 2025 program/kegiatan yang diusulkan meliputi 12 Program, 24 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

❖ **PROGRAM**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
5. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
11. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
12. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

❖ **KEGIATAN**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
14. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
15. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
16. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin

Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

17. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
20. Pengelolaan Sampah
21. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
22. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
23. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
24. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

❖ **SUB KEGIATAN**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
5. Penyediaan Bahan/Material (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)
12. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
13. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
14. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

15. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
16. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
18. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
19. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
20. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
21. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
22. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
23. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
24. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
27. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
29. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
31. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
32. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
33. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
34. Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)

35. Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
36. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
37. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
38. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
39. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
40. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
41. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
42. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
43. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
44. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
45. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
46. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
47. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)
48. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)
49. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
50. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
51. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
52. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
53. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
54. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
55. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
56. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

-
- 57. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 58. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 59. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 60. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 beserta pagu anggarannya dapat dilihat dalam tabel berikut :(*halaman selanjutnya*)

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
01.00	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					13,832,656,622.13			26,486,635,122
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	10,997,878,464.17			100 Persen	13,851,403,352
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90 Persen	0.02			90 Persen	35,000,000
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	5 Dokumen	0.01	APBD		5 Dokumen	20,000,000
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	0.01	APBD		1 Laporan	15,000,000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90 Persen	8,886,088,947.21			90 Persen	12,810,711,460
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Anambas	34 Orang	8,647,660,947.21	APBD		34 Orang	12,451,711,460
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	238,428,000.00	APBD		1 Dokumen	359,000,000
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		85 Persen	-			85 Persen	10,000,000
2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan		APBD		1 Laporan	10,000,000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		85 Persen	335,387,318.94			85 Persen	549,141,172

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	7,164,061.00	APBD		2 Paket	5,420,985
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	5 Paket	55,800,000.00	APBD		5 Paket	90,000,000
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Paket	106,285,929.00	APBD		3 Paket	85,000,000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	28,246,828.94	APBD		2 Paket	80,970,187
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	6 Laporan	27,206,500.00	APBD		6 Laporan	51,750,000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	110,684,000.00	APBD		2 Laporan	236,000,000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 Persen	1,423,664,143.00			80 Persen	143,480,920
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	56,081,683.00	APBD		1 Laporan	41,527,920
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	50,042,000.00	APBD		2 Laporan	68,686,000
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	19,029,464.00	APBD		2 Laporan	13,267,000
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	12 Laporan	1,298,510,996.00	APBD		12 Laporan	20,000,000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 Persen	352,738,055.00			80 Persen	303,069,800
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Anambas	8 Unit	308,375,625.00	APBD		8 Unit	218,560,000

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	44,362,430.00	APBD		1 Unit	84,509,800
01.1	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	257,312,833.00			100 Persen	492,967,588
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 Persen	200,072,553.00			80 Persen	332,427,300
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	2,528,799.00	APBD		1 Paket	2,500,000
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Paket	0.00	APBD		3 Paket	15,000,000
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	3,104,820.00	APBD		1 Paket	1,083,300
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Paket	168,058,934.00	APBD		3 Paket	250,000,000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	16,380,000.00	APBD		1 Paket	2,174,000
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	20,700,000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	10,000,000.00	APBD		2 Laporan	40,970,000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80 Persen	-			80 Persen	15,000,000
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	-	APBD		1 Unit	15,000,000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 Persen	52,350,280.00			80 Persen	33,320,288

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	12,834,280.00	APBD		1 Paket	9,360,288
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	39,516,000.00	APBD		2 Laporan	23,960,000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 Persen	4,890,000.00			80 Persen	112,220,000
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	3 Unit	4,890,000.00	APBD		2 Unit	7,140,000
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	0.00	APBD		1 Unit	105,080,000
01.2	UPT PENGELOLAAN SAMPAH								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	308,897,950.00			100 Persen	477,340,520
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		80 Persen	7,016,000.00			80 Persen	51,409,280
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	0.00	APBD		1 Paket	846,000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	0.00	APBD		2 Paket	4,406,280
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	5,216,000.00	APBD		1 Paket	2,880,000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	1 Paket	0.00	APBD		1 Paket	1,000,000
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Paket	0.00	APBD		2 Paket	9,700,000
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan		APBD		2 Laporan	5,177,000

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	1,800,000.00	APBD		2 Laporan	27,400,000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 Persen	9,730,750.00			80 Persen	5,797,273
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	2,790,000.00	APBD		1 Laporan	2,720,000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Anambas	2 Laporan	6,940,750.00	APBD		2 Laporan	3,077,273
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80 Persen	292,151,200.00			80 Persen	420,133,967
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Anambas	6 Unit	292,151,200.00	APBD		6 Unit	417,623,067
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	0.00	APBD		1 Unit	2,510,900
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Percentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		100 Persen	157,723,800.01			100 Persen	95,000,000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		80 Persen	127,051,800.00			80 Persen	70,000,000
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit		APBD		2 Unit	10,000,000
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	127,051,800.00	APBD		2 Unit	50,000,000
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit		APBD		2 Unit	5,000,000
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit	0.00	APBD		2 Unit	5,000,000

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		80 Persen		-			80 Persen	15,000,000
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan		0.00	APBD		1 Laporan	5,000,000
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Kepulauan Anambas	2 Unit		0.00	APBD		2 Unit	5,000,000
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan		0.00	APBD		1 Laporan	5,000,000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		80 Persen	30,672,000.01				80 Persen	10,000,000
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan		0.01	APBD		1 Laporan	5,000,000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antart Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antart Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	30,672,000.00	APBD			1 Unit	5,000,000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Percentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi angkutan laut		100 Persen	2,038,112,364.00				100 Persen	11,524,923,662
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Percentase Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		80 Persen	2,038,112,364.00				80 Persen	11,524,923,662
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kab. Kepulauan Anambas	5 Unit	1,995,235,164.00	APBD			5 Unit	11,514,923,662
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	42,812,200.00	APBD			1 Unit	5,000,000
2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Kab. Kepulauan Anambas	1 Unit	65,000.00	APBD			1 Unit	5,000,000

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		100 Persen	14,747,400.00			100 Persen	5,000,000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		80 Persen	14,747,400.00			80 Persen	5,000,000
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, dara, dan Laut	Kab. Kepulauan Anambas	1 Dokumen	14,747,400.00	APBD		1 Dokumen	5,000,000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Percentase Perlindungan Lingkungan Hidup		100 Persen	15,931,418.95			100 Persen	5,000,000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		80 Persen	15,931,418.95			80 Persen	5,000,000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Anambas	3 Ha	15,931,418.95	APBD		3 Ha	5,000,000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Aksi Pengendalian B3 dan Limbah B3		100 Persen	0.00			100 Persen	5,000,000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Diawasi		3 Kali	0.00			3 Kali	5,000,000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Kepulauan Anambas	1 Laporan	0.00	APBD		1 Laporan	5,000,000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Percentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100 Persen	18,960,900.00			100 Persen	5,000,000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		85 Persen	18,960,900.00			85 Persen	5,000,000

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Kepulauan Anambas	3 Badan Usaha	18,960,900.00	APBD		5 Badan Usaha	5,000,000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100 Persen	18,457,492.00			100 Persen	5,000,000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 Persen	18,457,492.00			85 Persen	5,000,000
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Kepulauan Anambas	3 Dokumen	18,457,492.00	APBD		3 Dokumen	5,000,000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan		100 Persen	0.00			100 Persen	5,000,000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85 Persen	0.00			85 Persen	5,000,000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Kepulauan Anambas	10 Entitas	0.00	APBD		10 Entitas	5,000,000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		100 Persen	0.00			100 Persen	5,000,000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Percentase Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		85 Persen	0.00			85 Persen	5,000,000

Rancangan Perubahan Renja
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

2025

2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Kepulauan Anambas	5 Pengaduan	0.00	APBD		5 Pengaduan	5,000,000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Berwawasan Lingkungan		100 Persen	4,634,000.00			100 Persen	10,000,000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah		80 Persen	4,634,000.00			80 Persen	10,000,000
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kab. Kepulauan Anambas	12.5 Ton	4,484,000.00	APBD		12.5 Ton	5,000,000
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kab. Kepulauan Anambas	5 Unit	150,000.00	APBD		5 Unit	5,000,000

BAB V PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan urusan bidang Perhubungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat bidang perhubungan dan lingkungan hidup.

Output Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah program tahunan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 09 Mei 2025

Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,
Kabupaten Kepulauan Anambas,



ABDUL KADIR, ST., M.Si

Pembina TKI (IV/b)

NIP.19790125 201001 1 007